

ABSTRAK

Pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden yang dijalankan berdasarkan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil (LuBerJulDil) merupakan salah satu wujud upaya peningkatan kualitas demokrasi khususnya Indonesia. Faktanya, masih terdapat banyak kasus pelanggaran pemilihan umum khususnya di Provinsi Jawa Tengah sehingga peran serta Bawaslu sangat dibutuhkan untuk meminimalisir pelanggaran Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan Badan Pengawas Pemilu, menganalisis hambatan Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas, dan mengetahui inovasi yang sudah dilakukan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal yaitu sebuah metode penelitian yang berpedoman pada aturan hukum guna menjawab permasalahan yang ada serta menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku dan konseptual mengenai masalah yang akan di bahas. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahak keputusan kepustakaan atau sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 meliputi tujuh tahapan proses pemilu sudah sesuai dengan delapan kewenangan Bawaslu seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 walaupun ada beberapa kasus pelanggaran dalam beberapa tahapan tersebut yang belum terselesaikan. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas menghadapi sejumlah hambatan diantaranya teknis dan logistik, keterbatasan kewenangan hukum, hambatan kompleksitas regulasi, netralitas ASN, sengketa proses dan penyelesaian hukum, serta hambatan partisipasi publik dan komunikasi. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam tujuh tahapan proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden 2024 setidaknya sudah melakukan berbagai inovasi walaupun terdapat dua tahapan yang tidak ada inovasi dalam hal pengawasan yaitu pada saat proses penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan serta penetapan hasil pemilu.

Kata Kunci: Pemilu, Bawaslu, LuBerJurDil.

ABSTRACT

The general election (Pemilu) of the President and Vice President, which is carried out based on the principles of Direct, General, Free, Confidential, Honest, and Fair (LuBerJulDil), is one of the efforts to improve the quality of democracy, particularly in Indonesia. In reality, there are still many cases of election violations, especially in Central Java Province, making the role of Bawaslu crucial in minimizing electoral violations. This research aims to analyze the implementation of the authority of the Election Supervisory Body (Bawaslu), to examine the obstacles faced by Bawaslu in carrying out its duties, and to analyze the innovations that have been implemented by the Central Java Provincial Bawaslu in supervising the 2024 Presidential and Vice-Presidential Election.

The method used in this research is the doctrinal approach, a research method based on legal rules to address existing problems, as well as applying statutory and conceptual approaches to the issues under discussion. Normative legal research is carried out by examining library or secondary sources.

The findings indicate that the implementation of the authority of the Central Java Provincial Bawaslu in the 2024 Presidential and Vice-Presidential Election, which encompasses seven stages of the electoral process, is in accordance with the eight authorities of Bawaslu as stipulated in Law Number 7 of 2017, although several cases of violations in some stages remain unresolved. In carrying out its duties, the Central Java Provincial Bawaslu encountered a number of obstacles, including technical and logistical issues, limited legal authority, regulatory complexity, civil servant neutrality, electoral disputes and legal resolution, as well as challenges related to public participation and communication. Within the seven stages of the 2024 Presidential and Vice-Presidential Election process, the Central Java Provincial Bawaslu has introduced various innovations, although there are two stages where no innovations in supervision were implemented, namely during the vote counting and re-voting process, the follow-up election, the postponed election, and the determination of election results.

Keyword: Pemilu, Bawaslu, LuBerJurDil.